

BAB II

GAMBARAN FENOMENA KEKERASAN SEKSUAL DAN GERAKAN

#METOO DI KOREA SELATAN

Pada BAB II ini, penulis akan membahas mengenai fenomena kekerasan seksual dan akar permasalahannya di Korea Selatan, Upaya Pemerintah yang telah dilakukan terhadap permasalahan Kekerasan Seksual, dan Aksi Gerakan *#MeToo* yaitu mengenai Perkembangan Gerakan *#MeToo* di Korea Selatan dan sekilas membahas mengenai perkembangannya di Dunia untuk mendefinisikan *#MeToo* sebagai bagian dari *Global Civil Society*.

2.1. Fenomena Kekerasan Seksual di Korea Selatan

Kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan hal yang marak terjadi di kehidupan sosial Korea Selatan. Bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan di Korea Selatan adalah kekerasan seksual meliputi tindakan perkosaan sampai dengan pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang asing atau kenalan maupun dalam hubungan pernikahan maupun kencan sampai dengan kekerasan seksual di tempat umum maupun sekolah dan tempat kerja.

Menurut data Pemerintah oleh Kang Chang-il dari Partai Demokrat Korea Selatan pada Oktober 2019, sebanyak 1.310 kasus kekerasan seksual yang terjadi dilaporkan dari tahun 2014 hingga tahun 2017. Pelaku kekerasan seksual sebanyak

99,8% adalah laki-laki dan sebanyak 28% merupakan kasus perkosaan.¹ Tindakan serangan seksual di ruang publik seperti pemerkosaan berdasarkan laporan pada tahun 2013, terdapat sebanyak 22.932 kasus pemerkosaan terhadap perempuan dan dari jumlah tersebut dapat digeneralisasikan bahwa setiap harinya terdapat sebanyak 63 perempuan yang mengalami pemerkosaan dan sebanyak 1 perempuan yang mengalami pemerkosaan dalam 23 menit sekali.² Selain itu, di Korea Selatan perempuan yang tinggal sendiri juga sangat berisiko karena tidak jarang terjadi kasus penguntitan terhadap perempuan baik yang dilakukan oleh orang asing maupun oleh orang yang dikenal. Kasus penguntitan di Korea Selatan pada tahun 2016 adalah sebanyak 555 kasus dan menunjukkan kenaikan sejak tahun 2014 dengan jumlah 297 kasus.³ Namun hanya sebesar 2.2% perempuan yang merupakan korban kekerasan seksual berani melaporkan kepada polisi.⁴

Data dari *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) mengenai kejahatan kekerasan seksual per 100.000 penduduk di Korea Selatan dengan total jumlah penduduk Korea Selatan sebanyak 51.269.554 jiwa.

¹ Suh-yoon Lee, 2019, *'Stalked for Rape': Fear Grows Among Women Living Alone*, The Korea Times, diakses dari http://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2020/08/251_269930.html (26/11/2020)

² Seoul Solution, 2016, *Fighting Violence Against Women: Making Seoul a Safer City for Women Project*, Seoul Solution, diakses dari <https://www.seoulsolution.kr/en/content/fighting-violence-against-women-making-seoul-safer-city-women-project> (20/11/2020)

³ Yonhap News, 2018, *Korea Toughening Rules Against Dating Violence, Stalking*, diakses dari <https://en.yna.co.kr/view/AEN20180222001500315> (16/12/2020)

⁴ UN Committee on The Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW), 2018, *Concerns and Recommendations on The Republic of Korea*, diakses dari https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/KOR/INT_CEDAW_NGO_KOR_30063_E.pdf (11/01/2021), Hal 8

Tabel 2.1 Data Kasus Kekerasan Seksual dari UNODC⁵

Data kasus Kekerasan Seksual di Korea Selatan								
Tahun	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah	18.220	19.491	19.619	22.310	21.055	21.286	22.200	24.110

Berdasarkan data pada **Tabel 2.1** di atas, dapat dilihat bahwa setiap tahunnya, kejahatan kekerasan seksual di Korea Selatan terus mengalami peningkatan. Walaupun menurun pada tahun 2014, namun meningkat lagi pada tahun 2015 sampai dengan 2017 yang melonjak naik menjadi 24.110 kasus.

Permasalahan kekerasan seksual seperti penyerangan seksual atau pemerkosaan merupakan kejahatan yang sangat serius. Namun di Korea Selatan, pelaku pemerkosaan dapat memohon keringanan hukuman atas dasar pelaku dalam keadaan tidak sadar atau sedang mengonsumsi minuman alkohol. Hukuman yang lebih ringan untuk pemerkosaan dengan kekerasan tidak jarang terjadi di Korea Selatan karena pengacara menggunakan alasan mabuk sebagai pembelaan. Hal ini didasarkan pada *The South Korea Criminal Code* Pasal 10 Ayat 2 Korea Selatan yang mengamanatkan pengurangan hukuman bagi orang-orang dengan gangguan mental yang mana individu dengan gangguan mental tidak dapat sepenuhnya bertanggung jawab secara hukum atas tindakan mereka karena mereka tidak melakukannya dan tidak memiliki kemampuan membedakan objek, orang, dan lingkungan dengan penilaian diskresioner yang jelas untuk menentukan tindakan

⁵ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Sexual Violence*, diakses dari <https://dataunodc.un.org/data/crime/sexual-violence> (23/12/2020)

mereka dan penyalahgunaan zat merusak kondisi mental seseorang jadi orang yang mabuk pada saat melakukan kejahatan kemampuan mereka berkurang sehingga harus menerima hukuman yang lebih ringan.⁶

Di samping itu, lingkungan pekerjaan juga menjadi tempat yang sangat rentan terjadinya tindakan kekerasan seksual terhadap perempuan. Persaingan untuk mendapatkan pekerjaan sangat ketat sehingga sebuah pekerjaan harus dipertahankan dengan baik. Hal ini sangat berdampak pada perempuan di lingkungan kerja, karena rekan kerja yang mempunyai otoritas lebih tinggi ataupun atasan dapat dengan mudah melakukan tindakan kekerasan seksual tentunya dengan mengancam posisi perempuan tersebut di dalam pekerjaan nya. Sebanyak 78% perempuan memilih untuk tidak melaporkan tindakan kekerasan seksual yang mereka alami dan hanya 22% yang berani melaporkan.⁷

Sebuah survei melalui wawancara oleh Kementerian Gender dan Keluarga pada tahun 2016 juga memperoleh hasil sebanyak 8 dari 10 responden mengalami pelecehan seksual di tempat kerja namun banyak yang memilih untuk tetap diam, mereka berpikir bahwa pengakuan masalah mereka tidak akan terselesaikan dan akan berdampak besar terhadap pekerjaan mereka.⁸ Jumlah laporan pelecehan seksual di tempat kerja pada tahun 2017 berjumlah sebesar 532 kasus lebih dari

⁶ Evelyn Nam dan Melody Kim, 2019, *In South Korea, Being Drunk Is a Legal Defense for Rape*, diakses dari <https://ksr.hkspublications.org/2019/07/16/in-south-korea-being-drunk-is-a-legal-defense-for-rape/> (24/12/2020)

⁷ Se-yung Park, 2019, *Sexual Harassment In South Korea*, Lyceum Vol.1, Universitas Hanyang, diakses dari <http://dis.hanyang.ac.kr/lyceum-vol-1/sexual-harassment-in-south-korea/> (26/11/2020)

⁸ Hwang-bo Yon, 2016, *8 out of 10 Korean workers experience sexual harassment, most don't report it*, The Hankyoreh, diakses dari http://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_national/738499.html (24/11/2018)

delapan kali lipat dari 263 kasus pada tahun 2012.⁹ Tetapi dari sekian banyak kasus tersebut, hanya sembilan tersangka yang kemudian didakwa ini juga kemudian memperlihatkan fakta baru tentang rapuhnya penegakkan hukum secara adil terhadap pelaku pelecehan seksual di Korea Selatan. Selain itu, kasus kekerasan seksual di tempat kerja menyumbang sebesar 65% dari seluruh kasus kekerasan seksual yang dilaporkan.¹⁰

Sehubungan dengan itu, seorang perempuan bernama Soo Jin membagikan ceritanya di mana di tempat ia bekerja di sebuah perusahaan desain dan furnitur interior Korea Selatan. Ketika ia menjadi karyawan tetap setelah sebulan ia berstatus sebagai pegawai pelatihan atau honorer ia mengklaim bahwa atasannya memperkosanya. Saat kasusnya dilaporkan, kasusnya tidak diproses secara hukum melainkan hanya diserahkan ke badan SDM dan dia hanya diberikan dua pilihan yaitu pertama adalah jika dia bersikeras tetap menuntut kasusnya, maka dia akan di pecat dan jika dia mengakui bahwa tidak ada paksaan atau menghapus tuntutananya maka ia dapat mempertahankan pekerjaannya namun tetap akan diberikan sanksi khusus karena akan dianggap sebagai pengajuan tuntutan palsu.¹¹

Dalam hal ini, dunia pekerjaan seperti industri hiburan juga sering terjadi kasus kekerasan seksual. Berdasarkan pengakuan salah seorang artis dari industri hiburan yaitu Amber, personil *Girl Band* F(X) pada acara peluncuran *Korean*

⁹ Ministry of Gender Equality and Family (MOGEF), *The Ministry of Employment and Labor (MOEL) and MOGEF jointly announce the "Plan to Eliminate Sexual Harassment and Sexual Violence in the Workplace"*, 2017, diakses dari http://www.mogef.go.kr/eng/pr/eng_pr_s101d.do?mid=eng001&bbsSn=705309 (24/11/2018)

¹⁰ Bureau of Democracy, Human Rights and Labor United States Department, 2018, *Republic of Korea 2018 Human Rights Report*, Hal 18, Diakses dari <https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/03/REPUBLIC-OF-KOREA-2018.pdf> (16/12/2020)

¹¹ Derrick Paulo, 2018, *Loc. Cit.*

'*Eleven Paris*' pada 1 April 2015 di Seoul. Amber mengungkapkan sisi gelap industri hiburan ia mengatakan ia dan teman-teman sesama anggota pernah mengalami pelecehan. Di mana biasanya pelecehan seksual dilakukan oleh pemilik perusahaan-perusahaan *sponsorship*.¹² Terdapat survei yang dilakukan oleh *Korean Film Council* (KOFIC), 10% perempuan yang bekerja di Industri Film di Korea Selatan pernah dituntut atau dipaksa melakukan tindakan seksual yang tidak diinginkan, dan 20% pernah dipaksa untuk melakukan kontak seksual yang tidak diinginkan. Sementara itu lebih dari setengah jumlah responden mengalami masalah pelecehan seksual namun tidak melakukan apa-apa dan hampir 40% mengatakan bahwa mereka mengalami pelecehan seksual namun berpura-pura tidak tahu.¹³

Tidak hanya di tempat kerja saja, kekerasan seksual terjadi juga di sekolah dan perguruan tinggi. Menurut survei yang dilakukan Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga kepada 1414 responden yang terdiri dari mahasiswi sarjana dan pascasarjana di 20 Universitas. Sebanyak 39,2% mahasiswi adalah merupakan korban pelecehan seksual.¹⁴ Selain itu, survei oleh *National Human Rights Commission of Korea* (NHRCK) terhadap 814 siswa perempuan sekolah menengah di Korea, sebanyak 40,9% mengatakan bahwa mereka percaya bahwa pelecehan

¹² Laura Bicker, 2018, *Loc. Cit.*

¹³ Sun-hee Yoo, 2018, *[Exclusive] 1 out of 10 female filmmakers, "I Was asked to have unwanted sex"*, Hankyoreh, diakses dari <http://www.hani.co.kr/arti/culture/movie/831160.html> (23/02/2021)

¹⁴ Ministry of Gender Equality and Family (MOGEF), 2002, *Reports on Sexual Harrassment at University Campuses in Korea*, diakses dari <http://www.mogef.go.kr> (13/12/2020)

seksual oleh guru ada dan 27,7% responden mengatakan pernah mengalami pelecehan seksual oleh guru mereka di sekolah.¹⁵

Nilai-nilai di sekolah yang secara terbuka memperlihatkan bahwa perempuan dipandang sebagai objek seksual adalah Sekolah mendefinisikan tubuh perempuan sebagai pornografi dimana mereka memberikan peringatan bahwa perempuan harus berhati-hati karena bisa menjadi konten pornografi kapan pun dan dimana pun. Perempuan didisiplinkan untuk tidak memakai rok pendek, diperintahkan untuk duduk dengan kaki dirapatkan dengan baik karena menggunakan rok. Perempuan yang mengenakan riasan wajah dinilai seperti pelacur dan menghindarkan perempuan untuk mengenakan bawahan maupun atasan yang ketat. Semua ini seolah membuat perempuan agar harus selalu berhati-hati dan yang akan selalu disalahkan ketika terjadi pelecehan secara seksual. Laki-laki juga dibenarkan karena memiliki pandangan bahwa perempuan merupakan objek seksual adalah sebuah hal mutlak dan tidak dapat dirubah. Semua sangat bergantung terhadap perempuan.

Tindakan kekerasan seksual juga tidak memandang hubungan antara korban dan pelaku. Artinya kekerasan seksual dapat terjadi dalam keterikatan hubungan pernikahan atau sekedar hubungan kencan. Berdasarkan survei tahun 2015 yang dilakukan oleh *Korean Institute of Criminology* tentang masalah kekerasan dalam hubungan intim dengan sampel acak sebanyak 4000 perempuan di Korea Selatan.

¹⁵ National Human Rights Commission of Korea (NHRCK), 2018, *NHRCK Surveys Spotlights Sexual Harassment of School Students*, Asia Pacific Forum, diakses dari <https://www.asiapacificforum.net/news/nhrck-survey-spotlights-sexual-harassment-school-students/> (15/12/2020)

sebanyak 71,7% responden mengatakan bahwa mereka merasa selalu dikendalikan atau dikontrol oleh pasangan mereka dan 37,9% mengalami kekerasan seksual dengan tindakan pelecehan seksual, dan 17,5% mengalami tindakan kekerasan seksual secara umum.¹⁶

Menurut data oleh polisi Korea Selatan pada Tahun 2019 hampir 10.000 kasus kekerasan seksual adalah berada pada hubungan pasangan yang sudah menikah maupun hubungan kencan. Jumlah itu menyumbang sebanyak 98% terhadap laporan kasus kekerasan seksual. Menurut studi tahun 2014 oleh *Women's Hotline* di Korea Selatan hampir 90% responden perempuan mengatakan mereka pernah mengalami pelecehan fisik atau pelecehan emosional dari pasangan.¹⁷ Salah satu LSM Korea Selatan yaitu *Hotline Wanita Korea* yang menjalankan layanan laporan dan keluhan perempuan juga menyampaikan bahwa berdasarkan data selama 35 tahun berjalan jalannya LSM ini, sebanyak 4 dari 10 jumlah yang menelepon adalah merupakan korban kekerasan seksual juga pelecehan dalam kondisi sedang dalam hubungan.¹⁸

Beberapa kasus diantaranya adalah dua perempuan dengan nama samaran “Momo” dan “Nana” mengalami kekerasan diremehkan oleh teman kencannya dan menerima kekerasan secara fisik juga pelecehan seksual di mana pasangan mereka

¹⁶ Seung-hee Ju, Young-oh Hong, dan Seong-Jin Yeon, 2017, *Violence Against Women: Focused on Intimate Partner Violence Between Lovers*, Laporan Korean Institute of Criminology, diakses dari https://eng.kic.re.kr/brdartcl/boardarticleView.do?brd_id=BDIDX_736t9S87ryDqxzPmkp5987&cont_idx=797&srch_menu_nix=w5mg0hj7&edomweivgp=R&srch_mu_lang=CDIDX00023 (27/11/2020)

¹⁷ Olivia Schieber, 2020, *South Korea Needs to Contend With Sexual Violence*. Artikel Foreign Policy. Diakses dalam <https://foreignpolicy.com/2020/08/10/south-korea-needs-to-contend-with-sexual-violence/> (26/11/2020)

¹⁸ Derrick Paulo, 2018, *Loc. Cit.*

membagikan konten rekaman seksual eksplisit mereka ke situs internet sebagai bentuk balas dendam saat korban memutuskan hubungan. Sebanyak 7.000 perempuan Korea Selatan pernah menemukan video pribadi mereka di situs web dewasa yang sengaja dibagikan oleh teman kencan mereka.¹⁹

Sebuah Perusahaan *EasyComz* di Korea Selatan bekerja untuk membantu meretas video yang telah tersebar di internet mengeluarkan data bahwa sejak perusahaannya dijalankan pada tahun 2017, setiap harinya ada sebanyak 20 klien perempuan yang mengajukan permintaan bantuan peretasan video di internet. Namun peretasan video bukanlah hal yang mudah pasalnya setelah video diunggah ke salah satu situs di internet, maka video tersebut akan dikloning atau digandakan dan diunggah secara otomatis ke situs lain dan yang menjadi kendala lain adalah layanan perusahaan ini juga membutuhkan biaya yang tinggi sebesar 3,2 juta won per bulan.²⁰ Dalam sebuah penelitian oleh *Korean Institute of Criminology* tahun 2017, 8 dari 10 berdasarkan 2000 responden dan sebanyak 80% pria mengaku melecehkan pacar mereka secara fisik maupun psikologis.²¹

Selain itu, pada Maret 2019, Kepolisian Korea Selatan juga lebih fokus untuk menyelidiki permasalahan kamera tersembunyi atau disebut “*molka*” yang berasal dari dua kata yaitu *Mollae* yang berarti tersembunyi dan *Kamera* yang juga

¹⁹ *South Korea's digital sex crime wave*, Channel News Asia, 2018, diakses dari <https://www.channelnewsasia.com/news/cnainsider/south-korea-s-digital-sex-crime-wave-9986288> (24/11/2018)

²⁰ Nicola Smith, 2017, *Almost 80% of South Korean men have abused girlfriend, study claims*, The Telegraph diakses dari <https://www.telegraph.co.uk/news/2017/08/24/almost-80-south-korean-men-have-abused-girlfriend-study-claims/> (24/11/2018)

²¹ Bureau of Democracy, Human Rights and Labor United States Department, 2017, *Republic of Korea 2017 Human Rights Report*, Diakses dari <https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/01/South-Korea.pdf> (16/12/2020) Hal. 18

berarti Kamera dalam Bahasa Indonesia. Sekitar 1.600 perempuan direkam tanpa sepengetahuan mereka di tempat umum seperti di kamar penginapan, ruang ganti pakaian dan toilet umum dan terdapat lebih dari 6.400 kasus yang telah dilaporkan pada tahun 2017. Hasil rekamannya biasa disebar di Internet dalam situs berlangganan atau situs web pornografi *online*. Lebih dari 5.400 orang ditangkap atas tuduhan terkait kasus ini sejak 2017 namun kurang dari 2% jumlah tersebut yang dipenjara.²² Pada 18 Maret 2019, Jung Joon-young seorang bintang K-pop, ditangkap setelah mengaku diam-diam merekam dirinya berhubungan seks dengan setidaknya 10 wanita dan membagikan videonya kepada teman-temannya melalui grup *chat*. Selanjutnya Pada tanggal 23 Maret, 2 pria ditangkap karena melakukan *streaming* “aktivitas intim pribadi” dari setidaknya 1.600 tamu motel dari kamera tersembunyi di 30 motel di 10 kota berbeda. Data pemerintah pada 2019 menunjukkan bahwa korban melaporkan sekitar 6.800 kasus *molka* ke polisi pada 2018.²³

Beberapa kasus besar yang juga berkaitan dengan kejahatan kekerasan seksual terjadi di Korea Selatan salah satu diantaranya adalah kasus *Burning Sun*. Kasus ini merupakan kasus prostitusi, perjudian, penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan pelanggaran Undang-undang Transaksi Valuta Asing yang melibatkan klub di Gangnam, beberapa *idol*, petinggi industri hiburan, hingga petinggi Kepolisian Korea. Kasus yang berkaitan dengan kekerasan seksual adalah

²² Fareehan Elgakhlab, 2019, *K-pop is Being Rocked by a Sex Scandal, It's Part of a Bigger Societal Problem*, Vox, diakses dari <https://www.vox.com/2019/4/29/18306249/k-pop-sex-scandal-seungri-burning-sun> (13/12/2020)

²³ Kenneth Roth, 2019, *South Korea Events of 2019*, Human Right Watch, diakses dari <https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/south-korea> (16/12/2020)

berupa pemerkosaan terhadap perempuan dengan memberikan mereka obat-obatan hingga tidak sadarkan diri serta mengabadikan hal tersebut dalam bentuk foto dan video kemudian menyebarkannya antar anggota yang terlibat kasus ini.²⁴

Kasus besar lainnya yaitu kasus *Nth Room* yang merupakan jaringan pemerkosaan *online* atau perbudakan seks *online*. *Nth Room* dijalankan di layanan pesan Telegram. Perbudakan seks disini dilakukan dengan cara memeras atau mengancam korban perempuan dewasa dan anak-anak menggunakan informasi pribadi yang dikumpulkan secara ilegal dari kantor pemerintah setempat agar para korban melakukan tindakan seksual eksplisit di depan kamera untuk dipertontonkan kepada ribuan pengguna *Nth Room*. Para korban yang terlibat adalah sebanyak 74 perempuan dewasa dan 26 anak-anak yang diberi sebutan “budak” oleh para pelaku.²⁵

2.2. Akar Permasalahan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Korea Selatan

Terkait permasalahan kekerasan seksual, perempuan cenderung menjadi pihak yang sangat dirugikan karena biasanya mereka selalu disalahkan bahkan dipermalukan jika berani mengungkapkan pengalaman kekerasan seksual. Maskulinitas laki-laki diukur dari aktivitas seksual mereka sementara perempuan

²⁴ Gabriel Wilder, 2019, *The Burning Sun Scandal That Torched South Korea's Elites*, The Interpreter, diakses dari <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/burning-sun-scandal-torched-south-korea-s-elites> (13/12/2020)

²⁵ Kelly Kasulis, 2020, *New Arrest Amid Nationwide Anger Over S Korea 'Sextortion' Case*, Aljazeera, diakses dari <https://www.aljazeera.com/news/2020/5/11/new-arrest-amid-nationwide-anger-over-s-korea-sextortion-case> (13/12/2020)

akan dipermalukan karena perilaku yang sama. Hal ini dapat disebabkan salah satunya karena mengakarnya budaya Konfusianisme yang memiliki nilai kesucian perempuan. Konfusianisme merupakan tradisi yang berasal dari Tiongkok dan telah diadopsi di Korea Selatan sejak abad 15 Masehi selama masa Dinasti *Choson* (Joseon) dimulai dari tahun 1392 sampai dengan tahun 1910. Dalam paham Konfusianisme terdapat tiga prinsip sosial utama yaitu pendeta yang setia, anak yang berbakti, dan perempuan yang suci. Konsep dari prinsip perempuan yang suci mengacu pada konsep kesucian tubuh atau keperawanan. Seksualitas perempuan dan hasratnya harus dijaga dan dipercaya hal tersebut untuk menjaga tatanan hierarki Konfusianisme antara jenis kelamin. Dalam konteks ini, pelaku perzinahan pada masa itu akan dihukum berat. Perempuan yang melakukan perzinahan akan dipenggal dan laki-laki yang terlibat akan dibuang atau diasingkan. Hal ini juga berlaku terhadap korban kekerasan seksual. Bahkan jika seorang perempuan dihadapkan oleh penyerangan secara seksual oleh laki-laki, perempuan tersebut harus rela bunuh diri dengan “*silver decorated knife*” atau “pisau berhias perak” yang selalu dibawa sebelum dia mendapatkan tindakan kekerasan seksual karena lebih baik dia mati dibandingkan tidak suci lagi.²⁶

Budaya patriarki maupun standar ganda seksualitas dalam masyarakat yang secara tidak langsung menempatkan perempuan pada posisi lebih rendah dibandingkan laki-laki merupakan manifestasi dari beberapa nilai paham konfusianisme yang telah mengakar di Korea Selatan dalam hal ini, Konfusianisme

²⁶ Young-hee Shim, 2001, *Feminism and the Discourse of Sexuality in Korea: Continuities and Changes*, Human Studies 24, diakses dari <https://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=0&sid=a8ff1256-fb22-4a60-9b81-187f2aba4de3%40sessionmgr102> (27/02/2021) hal 136-137.

Dinasti *Joseon* sebagai latar belakang sejarah masalah seksualitas.²⁷ Hal ini tercermin dalam penerapan budaya Konfusianisme dimana pada masa Joseon setiap keluarga membutuhkan anak laki-laki untuk melanjutkan keturunan dan anak perempuan dikirimkan untuk menikah ketika mereka dewasa. Ketika diserahkan untuk menikah, anak perempuan memegang tanggung jawab yang sangat besar karena berkaitan dengan reputasi keluarga. Setiap anak perempuan harus mengikuti apa pun yang diperintahkan oleh mertua dan suaminya karena jika tidak maka dia akan mempermalukan nama besar keluarganya.

Terlebih lagi, dalam rumah tangga juga terjadi pemisahan. Suami akan tinggal di kuarter terpisah yang disebut *sarangchae* dekat dengan gerbang atau ruang utama sementara istri dipisahkan di kuarter yang tersembunyi disebut *anchae* di balik *chungmun* atau gerbang tengah. Suami dan istri hanya tidur bersama pada hari-hari tertentu dan seks dalam hubungan pernikahan formal ini secara eksplisit ditujukan hanya untuk prokreasi. Tidak ditujukan untuk kesenangan seorang istri. Seorang istri tidak diizinkan untuk menuntut kesenangan seksualnya tetapi lain halnya dengan suami. Suami juga diizinkan untuk memiliki banyak istri dengan demikian seorang suami dapat mengejar kenikmatan seksual. Selain itu, terdapat juga rumah hiburan untuk pria. Sementara para istri harus bertindak sesuai dengan ideologi kesucian.²⁸

Tradisi dalam pernikahan inilah yang diadaptasi di keluarga Korea Selatan dan disebut sistem *Hojeok* atau *Hoju*. Dimana terdapat diskriminasi gender dalam

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.* Hal 135-136

keluarga. Jadi hanya keturunan langsung laki-laki yang mewarisi jabatan sebagai kepala rumah tangga secara turun-temurun. Laki-laki menjadi prioritas diatas perempuan dimana perempuan terdaftar dalam daftar keluarga di bawah ayahnya sampai menikah kemudian dia ditempatkan di bawah suaminya dan anak-anak terdaftar dalam keluarga suami walaupun seorang istri mempunyai hak asuh terhadap anak setelah bercerai. Sistem yang mulanya berasal dari keluarga ini berdampak meluas hingga masyarakat secara umum yang mendiskriminasi perempuan melalui stereotip seksual dimana perempuan tidak memiliki kesempatan menempatkan diri mereka dalam posisi penting dalam masyarakat atau memiliki posisi yang diakui secara mandiri secara sosial. Perempuan dibesarkan semata-mata untuk mengurus keluarga suaminya dan melahirkan anak untuknya dan dia tidak boleh memiliki pendapat atau kebutuhan apa pun untuk dirinya sendiri. Apa pun yang merupakan isu perempuan dianggap sebagai isu privat bukan publik yang berarti perempuan tidak dapat menyampaikan pendapat maupun melakukan protes sebagai tindakan dalam ruang publik. Permasalahan perempuan merupakan ruang privat sehingga perempuan dibiasakan untuk diam dan tunduk. Perempuan juga tidak mampu menyuarakan kebutuhannya akan hidupnya sendiri dan harus hidup hanya untuk suami dan putranya.²⁹

Budaya patriarki sebagaimana laki-laki memegang posisi kekuasaan atas perempuan adalah fenomena dimana perempuan dipisahkan dari laki-laki dan perempuan menjadi semua hal yang bukan laki-laki. Sebagaimana halnya juga laki-

²⁹ Inger Helene Johnsen Blegerberg, 2020, *#MeToo in South Korea and Japan A comparative Study of Newspapers' coverage of the MeToo Movement in South Korea and Japan*, Tesis Univesitas Oslo, diakses dari <https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/79913/-MeToo-in-South-Korea-and-Japan--Blegerberg.pdf?sequence=1&isAllowed=y> (18/02/2021)

laki dianggap kuat dan perempuan dianggap lemah, laki-laki dianggap rasional dan perempuan emosional, laki-laki dianggap aktif dan perempuan pasif dan lain sebagainya. Tak jarang di Korea Selatan bagi para istri untuk memegang payung ketika hujan dan untuk membuka pintu bagi suami mereka. Selain itu, orang tua kadang lebih menunjukkan favoritisme mereka terhadap putra lebih daripada putri mereka. Budaya seperti ini juga sangat mempengaruhi pandangan laki-laki terhadap perempuan. Perempuan dianggap lemah dan laki-laki cenderung lebih mudah bertindak sewenang-wenang terhadap perempuan.

Budaya patriarki dan standar ganda seksualitas ini sangat tergambar jelas dalam posisi perempuan di kehidupan sosial. Perempuan di Korea Selatan sering kali menempati pekerjaan bergaji rendah dan tidak tetap. Pekerjaan perempuan di Korea Selatan berdasarkan survei Ekonomi Korea 2018 oleh *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) adalah sekitar 56,1% sedangkan untuk laki-laki 75,9%. Perempuan di Korea Selatan juga hanya menempati 39,5% dari populasi pekerjaan waktu penuh. Korea Selatan juga berada pada peringkat 30 dari 36 negara OECD dalam kategori angkatan pekerja perempuan hal ini berbanding terbalik dengan tingkat Pendidikan perempuan yang tertinggi adalah angkatan pekerja yaitu berusia 25 hingga 34 tahun.³⁰ Bahkan data pada tahun 2019 kesenjangan upah berdasarkan gender di Korea secara garis besar adalah 32,5% dan merupakan negara dengan kesenjangan upah atau gaji tertinggi

³⁰ OECD, 2018, *OECD Economic Surveys: Korea*, diakses dari <https://www.oecd.org/economy/surveys/Korea-2018-OECD-economic-survey-overview.pdf> (12/12/2020)

dunia.³¹ Beberapa perusahaan juga melakukan manipulasi nilai kelulusan pelamar pekerja perempuan untuk mengecualikan kandidat pekerja perempuan dan mendukung laki-laki. Perusahaan tersebut diantaranya adalah Bank KB Kookmin, Bank KEB Hana dan Bank Shinhan, Perusahaan *Korea Gas Safety* (KGS). Pengecualian terhadap pekerja perempuan ini adalah dengan alasan karena perempuan dapat mengganggu kelangsungan bisnis karena cuti melahirkan dan berdasarkan hukum Korea, jika karyawan perempuan dipecat karena menikah, hamil, atau memiliki anak, mereka harus bertanggung jawab dengan berpeluang menghadapi hukuman penjara lima tahun atau denda hingga \$26.500.³²

Laki-laki di Korea Selatan bahkan tidak menyukai tindakan perempuan dalam mendukung gagasan feminisme dan kesetaraan gender seperti apa yang terjadi pada Irene member *Girlband* Red Velvet yang mengaku membaca buku dengan judul Kim Ji-young, Born 1982 yang merupakan sebuah novel Feminis bercerita tentang seorang wanita yang hidup dalam masyarakat patriarkal. Ia menyampaikan hal tersebut pada pertemuan dengan penggemarnya setelah itu banyak penggemar laki-laki Irene yang kemudian bereaksi dalam forum penggemar dengan menulis komentar kebencian dan mengunggah gambar dengan foto Irene dibakar di dalamnya.³³

³¹ OECD, 2019, *Gender Wage Gap*, diakses dari <https://data.oecd.org/earnwage/gender-wage-gap.htm> (05/02/2021)

³² Sophie Jeong, 2019, *South Korea's Glass Ceiling: the Women Struggling to Get Hired by Companies That Only Want Men*, CNN, diakses dari <https://edition.cnn.com/2019/01/31/asia/south-korea-hiring-discrimination-intl/index.html> (12/12/2020)

³³ SBS PopAsia, 2018, *Male Fans Burn Red Velvet Merch Because Irene Read a Feminist Novel*, diakses dari <https://www.sbs.com.au/popasia/blog/2018/03/19/male-fans-burn-red-velvet-merch-because-irene-read-feminist-novel> (11/12/2020)

Hal serupa juga terjadi kepada Aktris Kim Ja-yeon pada tahun 2016 yang dipecat sebagai pengisi suara perusahaan Game Nexon hanya karena ia mengenakan kaos bertuliskan “*Girls Do Not Need A Prince*”. Bukan hanya karena kalimat tersebut bersifat kontroversial dan mengusung ide Feminis namun juga karena kaos yang ia kenakan merupakan *merchandise* resmi yang dijual di situs web komunitas Feminis Korea Selatan yaitu Megalia. Hal ini dilakukan karena Megalia memiliki citra negatif karena pendekatan mereka yang bertujuan untuk menyelesaikan diskriminasi berbasis gender dengan menggunakan kata ‘feminisme’ di situs web mereka dan melakukan aktivitas tertentu yang secara langsung berkaitan dengan hak-hak perempuan. Dan jika seseorang berafiliasi atau mendukung kelompok feminis mana pun, tindakan tersebut dapat dijadikan alasan bagi sebuah perusahaan untuk memecat karyawan ataupun perwakilan mereka.³⁴

Laki-laki juga membuat gerakan Kontra Feminisme dengan komunitas bernama Dang Dang We. Komunitas ini diketuai oleh Moon Sung-ho dengan dalih memperjuangkan keadilan untuk laki-laki mereka mengungkapkan bahwa Feminisme bukanlah tentang kesetaraan gender melainkan diskriminasi gender terhadap laki-laki. Komunitas ini didirikan pada tahun 2018 setelah seorang pemilik bisnis dijatuhi hukuman selama 6 Bulan penjara setelah melakukan pelecehan seksual terhadap seorang perempuan di sebuah restoran dan dihukum tanpa bukti apa pun namun hanya berdasarkan pada tuduhan oleh perempuan tersebut.³⁵

³⁴ Se-woong Koo, 2016, *In Defense of Feminism*, Korea Expose, diakses dari <https://www.koreaexpose.com/in-defense-of-feminism/> (12/12/2020)

³⁵ Tanya Parmanand, 2019, *We Can Learn a Lot About Feminism from South Korea*, The Boar, diakses dari <https://theboar.org/2019/10/south-korea/> (12/12/2020)

Akhir kata, permasalahan hak-hak perempuan memang tidak akan pernah bisa dipisahkan dari permasalahan kesetaraan gender. Karena terpenuhinya hak-hak perempuan tersebut akan selalu berbanding lurus dengan berlangsungnya kesetaraan gender. Saat perempuan saja mampu didengar dengan baik maka permasalahan hak mereka juga tentunya akan didengar dan dihormati.

2.3. Upaya Pemerintah Menangani Masalah Kekerasan Seksual di Korea Selatan

Upaya pemerintah Korea Selatan adalah dengan menerapkan hukum di mana hukum untuk pemerkosaan dalam *Article 297 Criminal Act* menyebutkan bahwa perkosaan adalah tindakan ilegal dengan hukuman selama 3 tahun penjara dan jika menggunakan senjata atau perkosaan dilakukan lebih dari dua orang maka hukuman dimulai dari 5 tahun penjara sampai dengan seumur hidup. Dalam Undang-undang juga tertulis jika perkosaan dilakukan oleh saudara sendiri maka hukuman penjara minimum untuk perkosaan atau serangan seksual tanpa senjata meningkat dari 3 tahun menjadi 5 tahun dan jika menggunakan senjata dan melibatkan lebih dari 2 orang maka hukuman minimum meningkat menjadi 7 tahun. Hukuman perkosaan juga dimulai dari 3 tahun sampai dengan hukuman seumur hidup. Di dalam Undang-undang juga mengizinkan hakim atau komite MOJ untuk menghukum pelaku yang telah melakukan kejahatan kekerasan seksual berulang kali adalah dengan dapat memutuskan memberlakukan hukuman “Pengebirian kimiawi” dimana pelaku akan menjalani serangkaian perawatan medis yang dirancang untuk mengurangi dorongan seksual. Pemerintah juga mendirikan

sebanyak 156 pusat konseling untuk korban kekerasan seksual dan 22 fasilitas perlindungan nasional.³⁶

Upaya pemerintah untuk kejahatan pelecehan seksual telah diatur dalam Undang-undang bahwa mewajibkan perusahaan dan organisasi maupun instansi untuk mengambil tindakan pencegahan terhadap pelecehan seksual. Untuk yang melanggar atau didapati melakukan pelecehan seksual maka akan dikenakan sanksi hukuman penjara dan denda sampai dengan 10 juta won. Untuk klaim pelecehan seksual pemerintah menyediakan *Civil remedies* atau pemulihan sipil dan untuk tindakan pencegahan, pemerintah juga mengadakan pendidikan tentang pelecehan seksual.³⁷ Undang-undang ini awalnya merupakan hasil kemenangan kasus pelecehan seksual pertama di Korea Selatan yang dimulai pada tahun 1993 sampai dengan tahun 1999. Kasus ini diungkap oleh seorang siswi yang menjadi asisten pengajar. Dia mengajukan gugatan tindakan pelecehan seksual terhadap profesor Kimia dari Universitas Nasional Seoul.³⁸

Karena itu, tindakan pelecehan seksual yang merupakan setiap perilaku negatif dengan mempermalukan orang lain dalam konteks seksual secara fisik maupun verbal terlebih secara spesifik di tempat kerja yaitu menggunakan posisi jabatan yang lebih tinggi untuk merugikan individu lain secara seksual mulai dikenal dan menjadi konteks dalam amandemen Undang-undang Kesetaraan

³⁶ Bureau of Democracy, Human Right and Labor United States Department. 2013. *Republic of Korea Report 2013 Human Rights Executive Summary*. <https://www.state.gov/documents/organization/220416.pdf> (16/11/2018)

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Hae-ryun Kang, 2020, *Seoul's Mayor Championed Women's Rights. The #Metoo Allegations Against Him Bitterly Divided Korea*, Time, diakses dari <https://time.com/5875265/seoul-mayor-metoo-south-korea/> (03/02/2020)

Gender dan Ketenagakerjaan pada Tahun 1999. Selanjutnya pada tahun 2007 Undang-undang ini kembali mengalami amandemen dengan memperluas cakupan potensi pelaku pelecehan seksual di tempat kerja dengan menambahkan regulasi untuk pihak ketiga seperti pelanggan dan klien. Terakhir pada tahun 2018 Undang-undang ini juga mengalami amandemen dengan memberlakukan regulasi yang lebih ketat termasuk didalamnya yaitu Pendidikan preventif pencegahan tindakan pelecehan seksual, tindakan cepat tanggap pengambilan langkah investigasi kejadian pelecehan seksual jika ada yang melapor, kebijakan privasi korban dan memberikan waktu cuti sebagai dukungan pemulihan mental korban.³⁹

Dalam upaya memberantas permasalahan kekerasan seksual, Perdana Menteri Korea Selatan Lee Nak-yon mengeluarkan Aturan untuk Pembentukan dan Operasi Tim Inspeksi Pemerintah Komprehensif dalam peraturan Perdana Menteri No.713, 30 Maret 2018. Sesuai dengan peraturan ini, Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga membentuk Tim Inspeksi Pemerintah Komprehensif yang terdiri dari 16 anggota yang diutus masing-masing dari beberapa bagian Kementerian seperti Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga, Kementerian Pendidikan, Kementerian Administrasi Publik, Kementerian Kebudayaan, Kementerian Olahraga dan Pariwisata, Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan,

³⁹ Ju-sung Lee dan Mi-hyun Oh, 2020, *Combat Workplace Sexual Harassment by Third Parties? Reframing Institutional Measures and Cultural Transformation in South Korea*, Sage Journal, diakses dari https://www.researchgate.net/publication/346614104_Combat_Workplace_Sexual_Harassment_by_Third_Parties_Reframing_Institutional_Measures_and_Cultural_Transformation_in_South_Korea (20/02/2021) Hal. 2

Kementerian Ketenagakerjaan dan Tenaga Kerja, Kementerian Manajemen Personalia, dan dari Komnas HAM serta kepolisian Nasional.⁴⁰

Menurut Undang-undang Peraturan Perdana Menteri No. 713, Pasal 3 ayat 1, Tim Inspeksi bertugas mengawasi dan mendukung penyelidikan khusus tentang kekerasan seksual di setiap sektor masyarakat; Pasal 3 Ayat 2 Tim Inspeksi mendirikan dan mengoperasikan pusat pelaporan untuk kekerasan seksual; dan Pasal 3 Ayat 4, Jika ada kejadian yang dilaporkan, maka Tim Pemeriksa meminta instansi terkait untuk menindaklanjuti laporan tersebut, termasuk melakukan perlindungan terhadap korban juga mempersiapkan tindakan untuk mencegah kejadian tersebut terulang kembali.⁴¹

Pemerintah Korea Selatan pada Maret 2018 mengeluarkan kebijakan dengan membuka Operasi “Pusat Khusus Pelaporan Pelecehan Seksual dan Serangan Seksual” di sektor publik selama 100 hari. Pemerintah juga melakukan Pembentukan dan pengoperasian dewan pemerintah, yang diketuai oleh Menteri Kesetaraan Gender dan Keluarga selain itu Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga juga membuat papan buletin *online* di situs web Institut Hak Asasi Manusia Wanita Korea untuk menerima laporan dan membantu para korban perempuan di tempat kerja, untuk menerima perlindungan yang baik tanpa takut terhadap ancaman dan kerahasiaan individu tersebut. Sedangkan untuk kasus

⁴⁰ Sayuri Umeda, 2018, *South Korea: Efforts to Eradicate Sexual Harassment and Sexual Violence in Government Agencies*, Global Legal Monitor, diakses dari <https://www.loc.gov/law/foreign-news/article/south-korea-efforts-to-eradicate-sexual-harassment-and-sexual-violence-in-government-agencies/> (10/01/2021)

⁴¹ *Ibid.*

kekerasan seksual di bidang akademisi pusat pelaporan online dioperasikan oleh Kementerian Pendidikan.

Melaksanakan pemeriksaan khusus serta pemberitahuan dan konsultasi terhadap 4.946 lembaga termasuk Lembaga negara, kota, dan Lembaga publik lainnya, melakukan survei tentang pengalaman korban kekerasan seksual untuk mengevaluasi kebijakan yang dapat diambil terhadap bentuk penyerangan seksual berdasarkan pengalaman korban dan manajemen Pendidikan pencegahan. Menugaskan ‘Ombudsman Pelecehan Seksual’ untuk melakukan penyelidikan dengan memantau kebijakan mengenai kekerasan seksual diberlakukan dengan adil dan dukungan konsultasi juga membantu sistem perlindungan korban untuk bekerja dan ‘Komite Solusi untuk Menangani Kasus Pelecehan Seksual di Tempat Kerja’ yang terdiri dari pengacara, pengacara ketenagakerjaan, dan pakar terkait lainnya juga mengirimkan anggota komite ke Lembaga publik untuk memberikan layanan konseling tentang kekerasan seksual di tempat kerja jika diperlukan.

Melakukan program penguatan terhadap Pendidikan pencegahan dan peningkatan kesadaran tentang kekerasan seksual juga kesetaraan gender dengan menyertakannya dalam Pendidikan untuk promosi maupun pengangkatan pegawai negeri sipil dan manajer tingkat tinggi. Pendirian pusat konseling terkait seks serta merekomendasikan agar universitas menyediakan kelas tentang topik hak asasi manusia termasuk Pendidikan seks dan kesetaraan gender kepada mahasiswa dan

memberikan Pendidikan pencegahan tindakan kekerasan seksual dalam acara-acara kemahasiswaan.⁴²

Pada 29 April 2020, Majelis Nasional Korea Selatan mengeluarkan serangkaian Undang-undang untuk mempermudah penuntutan terhadap kejahatan seksual digital. Di bawah Undang-undang ini, mereka yang memiliki, membeli, menyimpan, atau menonton konten seksual yang direkam secara ilegal dapat dihukum maksimal tiga tahun penjara atau denda sebesar 30 juta won atau setara dengan \$24.660.⁴³

Pemerintah menguatkan Undang-undang terhadap kejahatan seksual digital dengan menerapkan hukuman yang lebih keras terhadap tindakan produksi dan distribusi konten kekerasan seksual digital dari hukuman sebelumnya yang relatif ringan dan secara khusus pemberian hukuman terhadap penjualan materi eksploitasi seksual anak dan remaja dengan penerapan batasan hukum persyaratan dan materi iklan yang memuat konten mengenai anak dan remaja dan menjatuhkan hukuman terhadap konten yang memuat tindakan pelecehan seksual terhadap anak dan remaja. Selain itu, tindakan berkomplot atau bersekongkol untuk melakukan tindakan kekerasan seksual sama halnya dengan tindakan pembunuhan berencana akan dihukum.

Dalam sistem hukum pemerintah akan menciptakan standar hukuman yang lebih ketat untuk kejahatan seks digital dengan menerapkan sistem penyitaan

⁴² Ministry of Gender Equality and Family, 2018, *A Pan-Governmental Control Tower to be in Full Operation to Eradicate Sexual Harassment and Sexual Violence*, diakses dari http://www.mogef.go.kr/eng/pr/eng_pr_s101d.do;jsessionid=dk7XyBf4UETAiC32U7ty9fZY.mogef20?mid=eng001&bbtSn=705519 (10/01/2021)

⁴³ Kelly Kasulis, 2020, *Loc. Cit.*

terpisah yang memungkinkan jaksa penuntut untuk dapat menyita bukti dan hasil tindakan kriminal bahkan sebelum pelaku tersebut didakwa atau dihukum dan aset yang diperoleh selama periode kejahatan akan dianggap sebagai hasil kriminal untuk memastikan bahwa pelanggar tidak mendapatkan uang keuntungan dari tindakan kejahatan mereka. Pemerintah juga akan memberikan efek jera berupa peningkatan pengungkapan informasi pribadi seperti wajah tersangka dalam tahap investigasi kriminal yang sebelumnya terbatas hanya pada kasus pemerkosaan dan serangan seksual.⁴⁴

Beberapa sistem lain juga ditingkatkan seperti menambahkan pilihan media untuk melaporkan tindakan yang sebelumnya hanya ada lewat telepon maupun internet sekarang ditambahkan dengan media *chatbot*. Penanganan yang lebih proaktif dengan menyelidiki permasalahan langsung pada akarnya yang sebelumnya hanya fokus memutus pada konten seksual digital yang telah tersebar. Memaksimalkan terapi psikologis korban dan memperkuat peran Pusat Dukungan Korban Kejahatan Seksual Digital untuk mengoperasikan sistem dukungan selama 24 jam yang memberikan dukungan komprehensif, termasuk penghapusan konten seksual yang telah tersebar, konseling sepanjang waktu, bantuan investigasi dan membantu melacak dan menghapus penyebaran konten seksual. Selain itu pemerintah juga memberikan tanggung jawab terhadap bisnis operator internet yang sebelumnya hanya diwajibkan untuk menghapus konten yang direkam secara ilegal segera setelah menemukannya sedangkan sekarang mereka harus menyelidiki

⁴⁴ Ministry of Gender Equality and Family, 2020, *Harsher Punishment and Stronger Protection against Digital Sex Crime*, diakses dari http://www.mogef.go.kr/eng/pr/eng_pr_s101d.do?mid=eng001&bbsSn=707003 (11/01/2021)

lebih jauh lagi untuk dapat menghapus semua konten kekerasan seksual digital dan menjalankan program keamanan untuk menghapus dan menyaring konten ilegal untuk mencegah distribusi konten kekerasan seksual serta jika melanggar maka akan dikenakan denda.⁴⁵

Permasalahan Kekerasan seksual di Korea Selatan sangat kompleks, karena permasalahan ini maraknya terjadi bukan hanya di tempat kerja melainkan juga di sekolah dan tingkat universitas, kekerasan seksual yang terjadi dalam jalinan hubungan, bahkan yang terjadi dalam ranah digital. Selain itu beberapa kasus besar mengenai permasalahan kekerasan seksual juga terjadi di Korea Selatan diantaranya adalah kasus *Molka*, *Burning Sun*, dan *Nth Room*.

Beragam permasalahan kekerasan seksual dan tingkat ketidaksetaraan gender yang tinggi sedangkan sistem normatif dan berbagai penerapan konsultatif terhadap permasalahan kekerasan seksual sebagai bentuk upaya pemerintah belum mampu menyelesaikan permasalahan kekerasan seksual sehingga dibutuhkan gerakan dari level *grassroot*. Maka dari itu Gerakan *#MeToo* muncul sebagai gerakan *grassroot* yang diadopsi dari Gerakan global sebagai bagian dari *Global Civil Society*. Berikut adalah pembahasan mengenai Gerakan *#MeToo* di level nasional di Korea Selatan dan Gerakan *#MeToo* sebagai *Global Civil Society*.

⁴⁵ *Ibid.*

2.4. Aksi Gerakan #MeToo

2.3.1. Perkembangan Gerakan #MeToo di Korea Selatan

Gerakan #MeToo di Korea Selatan sangat berbeda dengan di Amerika Serikat yang sebagian besarnya direpresentasikan oleh selebriti sedangkan di Korea Selatan justru dimulai oleh warga biasa. Gerakan #MeToo di Korea Selatan mulai berkembang sejak bulan Januari tepatnya pada 29 Januari 2018 yang dimulai oleh seorang Jaksa cabang Tongyeong Kantor Kejaksaan Distrik Changwon, Seo Ji-hyun yang mengaku secara langsung saat di wawancarai di kanal berita stasiun TV JTBC bahwa ia mengalami pelecehan seksual oleh atasannya atau Jaksa senior yaitu Ahn Tae-gun di depan umum dan diantara banyaknya rekan kerja lainnya saat acara pemakaman dimana Ahn Tae-gun meraba-raba bagian tubuh Seo Ji-hyun dan ia bahkan ditugaskan ke cabang tingkat yang lebih rendah tidak lama setelah ia melaporkan kejadian tersebut kepada manajernya.⁴⁶ Ahn Tae-gun lalu dijatuhi hukuman dua tahun penjara pada Januari 2019.⁴⁷

⁴⁶ Sue Mi Terry, 2018, *South Korea is in the Middle of its Own #MeToo Movement*, Center for Strategic and International Studies, diakses dari <https://www.csis.org/analysis/south-korea-middle-its-own-metoo-movement> (19/11/2018)

⁴⁷ Sang-hun Choe, 2020, *Mayor of South Korean City Resigns in #MeToo Case*, New York Times, diakses dari <https://www.nytimes.com/2020/04/23/world/asia/south-korea-busan-mayor-resigns-metoo.html> (17/01/2021)

Gambar 2.1 Pengakuan oleh Seo Ji-hyun



(Sumber: Arirang.co.kr)

Kemudian pada 5 Maret 2018 Seorang Gubernur Provinsi ChungCheong Selatan dan merupakan calon potensial presiden berikutnya yaitu Ahn Hee-jung dilaporkan oleh sekretarisnya Kim Ji-eun atas tindakan pemerkosaan dalam perjalanan bisnis ke luar negeri dan mengaku bahwa ia telah diperkosa sebanyak empat kali dan berulang kali dilecehkan. Sehari setelahnya Ahn Hee-jung kemudian memberikan pernyataan permintaan maaf di laman *Facebook* resmi nya dan mengundurkan diri juga dijatuhi hukuman selama tiga tahun dan delapan bulan penjara.⁴⁸ Pada 7 Maret 2018 Seorang politisi Chung Bong-ju sebagai mantan anggota Parlemen juga dilaporkan atas tindakan kekerasan seksual oleh perempuan yang menyamakan identitasnya. Chung disampaikan melakukan tindakan kekerasan seksual di sebuah hotel di Yeouido Kota Seoul pada 12 Desember 2011

⁴⁸ Sue Mi Terry, 2018, *Loc. Cit.*

ketika dia masih menjadi mahasiswa.⁴⁹ Begitu pula Min Byung-doo yang merupakan seorang anggota parlemen mengajukan pengunduran dirinya ke Majelis Nasional pada 12 Maret 2018 setelah dituduh melakukan pelecehan seksual di ruang karaoke oleh seorang perempuan.⁵⁰

Gambar 2.2 Ahn Hee-jung dijatuhi hukuman penjara



Ahn Hee-jung dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun dan 8 bulan setelah terbukti bersalah telah melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap Kim Ji-eun.
(Sumber: koreantimes.co.kr)

Setelah gerakan *#MeToo* yang dilakukan oleh Seo Ji-hyun dan Kim Ji-eun, muncul lagi dari kalangan industri budaya pada awal Februari. Seorang sutradara film mengatakan bahwa ia telah mengalami tindakan kekerasan seksual dalam

⁴⁹ Se-hwan Bak, 2018, *Ex-lawmaker Chung Bong-ju's Accuser Repeats Sexual Assault Allegation*, The Korea Herald, diakses dari <http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20180327000714> (03/02/2020)

⁵⁰ Hee-kyong Yang, 2018, *South Korea's Ruling party reels from More Sex Abuse Allegations, vows 'zero tolerance'*, Reuters, diakses dari <https://www.reuters.com/article/us-southkorea-metoo-politician-idUSKCN1GO0V7> (10/04/2021)

bentuk serangan secara fisik oleh rekan sutradaranya yang bernama Lee Hyun-ju pada tahun 2015. Laporan kemudian muncul lagi dan ditujukan kepada direktur teater Lee Youn-taek yang sangat terkenal di Korea Selatan dilaporkan oleh 16 wanita yang merupakan rekan kerja juniornya. Sutradara film Kim Ki-duk juga dituduh melakukan pelecehan seksual oleh beberapa selebriti selain itu aktor Cho Jae-hyun dan Jo Min-ki juga mendapatkan tuduhan yang sama terlebih Jo Min-ki melakukan bunuh diri setelah ia dituduh dan mengaku juga meminta maaf kepada korban yang tercantum dalam surat bunuh dirinya.⁵¹ Selain itu, seorang aktris Uhm Ji-young dan beberapa aktris lainnya juga mengungkapkan bahwa aktor senior Oh Dal-su melakukan serangan seksual terhadap mereka pada tahun 1990-an. Awalnya tuduhan itu dibantah, namun Uhm Ji-young secara terbuka membantah pernyataan tersebut di dalam wawancara stasiun TV JTBC. Kemudian Oh Dal-su mengeluarkan permintaan maaf ke publik.⁵²

Penyair puisi paling terkenal Ko Un juga dituduh melakukan pelecehan seksual. Hal ini menyebabkan puisinya dihapus dari buku dan perpustakaan yang didirikan atas namanya oleh pemerintah Kota Seoul di tutup. Ko Un awalnya dituduh oleh Penyair Choi Young-mi yang menerbitkan sebuah puisi berjudul "*The Beast*" yang secara implisit mengungkapkan bahwa Ko Un melakukan pelecehan seksual terhadap dirinya. Tuduhan lain juga menyusul muncul mengungkapkan permasalahan kekerasan seksual dalam dunia sastra dimana seniman terkenal

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Min-sik Yoon, 2018, *Korean Actor Oh Dal-su Apologies for Sexual Harassment After Victim Reveals Identity*, Asiaone news, diakses dari <https://www.asiaone.com/entertainment/korean-actor-oh-dal-su-apologises-sexual-harassment-after-victim-reveals-identity> (09/042021)

menggunakan pengaruh mereka untuk mendapatkan “layanan” seksual dari penulis muda dengan balasan karya mereka dapat diterbitkan.⁵³

Dengan adanya pengakuan-pengakuan tersebut, seorang pendeta gereja terkemuka di Korea Selatan Lee Jae-rock juga dilaporkan oleh delapan perempuan mantan pengikutnya bahwa dia melakukan tindakan kekerasan seksual dengan memanfaatkan ajaran agama untuk membohongi korban. Beberapa dari mereka yang melaporkan kasus tersebut mengatakan kepada wartawan bahwa dia membujuk mereka untuk datang ke apartemennya dan memerintahkan mereka untuk telanjang dengan dalih bahwa tindakan tersebut adalah seperti yang dilakukan Adam dan Hawa di Taman Eden kemudian memperkosa mereka. Terlebih lagi para korban dituntun untuk percaya bahwa jalan ke surga dapat dicapai dengan memperlakukan dia seperti Tuhan. Lee Jae-rock kemudian ditangkap pada Bulan Mei. Setelah ditangkap dan diselidiki oleh pihak kepolisian terungkap bahwa delapan perempuan tersebut telah diperkosa puluhan kali antara tahun 2000 dan 2014.⁵⁴

⁵³ Alison Flood, 2018, *Poet Ko Un Erased From Korean Textbooks After Sexual Harassment Claims*, The Guardian, diakses dari <https://www.theguardian.com/books/2018/mar/02/ko-un-korea-sexual-harassment-claims> (03/02/2020)

⁵⁴ Sang-hun Choe, 2018, *South Korean Church Leader Sentenced to Prison in #MeToo Case*, New York Times, diakses dari <https://www.nytimes.com/2018/11/22/world/asia/south-korea-pastor-rape.html?action=click&auth=login-google&module=RelatedLinks&pgtype=Article> (02/02/2021)

Gambar 2.3 Lee Jae-rock dijatuhi hukuman penjara



(Sumber: nytimes.com)

Pada tahun 2020, Walikota Busan Oh Keo-don juga dilaporkan oleh seorang pegawai negeri bahwa ia melakukan tindakan pelecehan seksual di kantornya pada 7 Maret 2020. Pegawai tersebut melaporkan hal tersebut pada pusat konseling yang melawan kekerasan seksual di Busan dan menuntut agar Oh Keo-don mengeluarkan permintaan maaf di depan publik serta mengundurkan diri. Pusat tersebut memulai penyelidikan dengan menghubungi penasihat kebijakan walikota. Setelah itu, Oh Keo-don kemudian melakukan Konferensi pers untuk mengakui kesalahannya dan mengundurkan diri pada 23 April 2020.⁵⁵

⁵⁵ Myo-ja Ser dan Eun-ji Lee, 2020, *Busan Mayor Admits Molesting a Woman and Quits*, Korea JoongAng Daily, diakses dari <https://koreajoongangdaily.joins.com/2020/04/23/politics/Busan-Mayor-Oh-admits-molesting-a-woman-and-quits/3076447.html> (02/02/2020)

Gambar 2.4 Permintaan maaf dan pengunduran diri oleh Oh Keo-don



(Sumber: Koreajoongdaily.joins.com)

Mantan sekretaris Walikota Seoul mengajukan laporan kepada polisi mengatakan bahwa Walikota Seoul yang menjabat saat itu yaitu Park Won-soon melakukan pelecehan seksual terhadap dirinya selama 4 tahun. Namun bukan pengunduran diri yang dilakukan oleh Park Won-soon setelah dilaporkan melaikan tindakan bunuh diri di Pegunungan Seoul dan ditemukan tewas pada 10 Juli 2020 yaitu 2 hari setelah ia dilaporkan.⁵⁶

Pelecehan seksual yang diungkapkan sebagai Gerakan *#MeToo* tidak hanya melibatkan publik figur saja melainkan ini juga digunakan untuk mengungkapkan pelecehan seksual yang terjadi di sekolah. Hal ini dimulai oleh seorang siswa perempuan Kim Na-yoon yang mengungkapkan bahwa ia mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh siswa laki-laki pada 16 Februari 2018 di depan kantor

⁵⁶ Hae-ryun Kang, 2020, *Loc. Cit.*

kepresidenan di pusat Kota Seoul. Kemudian disusul oleh Lee Yu-jin pada bulan April 2018 yang melaporkan bahwa ia mengalami pelecehan seksual secara verbal dengan menjadi subjek “perbincangan di ruang ganti”.⁵⁷

Laporan tentang pelecehan seksual di sekolah bukan hanya berasal dari sesama siswa akan tetapi juga yang dilakukan oleh guru terhadap siswa. Seorang mantan siswa melaporkan kisahnya menggunakan tagar *#SchoolMeToo* di mana ia mengatakan bahwa seorang guru sekolah menengahnya mencabuli dan menguntitnya pada tahun 2000. Ketika mantan siswa ini menolak untuk berhubungan dengan gurunya, dia kemudian dipanggil dengan sebutan yang kasar dan gurunya menyalahi dia dengan berkomentar bahwa tidak ada siswa yang bertindak seperti dia. Mantan siswa ini dianggap kasar jika menolak perintah gurunya. Sementara itu ada juga yang melaporkan dia pernah dilecehkan seorang guru pada saat dia menduduki kelas 5 pada tahun 1998. Mereka yang melaporkan mengaku mengambil bagian sebagai gerakan *#MeToo*.⁵⁸

Yang Ji-hye mengaku bahwa dia dan teman-temannya selalu menerima tindakan pelecehan seksual oleh salah satu guru mereka. Setiap semester baru dimulai mereka harus pergi menemui guru tersebut untuk pertemuan empat mata dan guru tersebut akan menyentuh mereka sehingga saat menemui nya dia dan teman-teman nya harus menggunakan selimut dan buku tebal untuk menutupi kaki dan dada mereka. Selain itu Baek Kyung-ha seorang siswa yang juga mendukung

⁵⁷ Hyun-ju Ock, 2019, *[Feature] Despite #MeToo, Change Yet to Come to Schools*, The Korea Herald, diakses dari <http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20190304000800> (05/02/2021)

⁵⁸ Nicola Smith, 2018, *South Korea's rapid MeToo movement spreads to schools as pupils accuse teachers*, The Telegraph, diakses dari <https://www.telegraph.co.uk/news/2018/03/05/south-koreas-rapid-metoo-movement-spreads-schools-pupils-accuse/> (15/11/2018)

gerakan *#SchoolMeToo* juga mengungkapkan bahwa tidak jarang di sekolahnya para guru sering melakukan pelecehan seksual yang bersifat verbal seperti meminta siswanya untuk membayangkan perempuan berpakaian seksi dan menuntut mereka memanggil guru dengan sebutan “*oppa*” yang biasanya merupakan sebutan untuk pacar laki-laki.⁵⁹

Seorang siswa yang tidak disebutkan nama nya juga mengungkapkan bahwa dia dan teman-teman nya mengalami pelecehan seksual oleh guru mereka. Dia mengatakan bahwa guru nya sering menyentuh lengan dan pinggang nya serta membuat lelucon cabul kepada dia dan teman-teman nya. Guru itu juga mengatakan akan memberi nilai sempurna jika mereka duduk di pangkuannya juga mengajak siswa untuk pergi karaoke dan mendapatkan pijatan serta menyampaikan bahwa perempuan harus terlihat seksi kepada siswi tersebut. Pada Januari 2019 seorang siswa di Incheon juga mengungkapkan bahwa gurunya mengatakan kepada siswa bahwa seragam sekolah adalah pakaian yang paling erotis karena memicu imajinasi vulgar seseorang.⁶⁰

Pelecehan seksual di dunia Olahraga juga diungkapkan oleh Atlet *Speed skating* pada bulan Desember 2018 yaitu Shim Suk-hee yang mengatakan bahwa mantan pelatihnya yaitu Cho Jae-beom berulang kali memperkosanya sejak tahun 2014 dan lima orang lainnya yang tidak disebutkan identitasnya mengalami pelecehan seksual oleh pelatih mereka secara fisik maupun verbal berdasarkan pernyataan kelompok *Solidarity for Young Skaters*. Selain *Speed Skating*, Shin

⁵⁹ Suh-yoon Lee, 2019, *Finding Little Support at Home, Young #MeToo Activists Take Their Case to UN*, The Korea Times, diakses dari https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2019/02/113_263200.html (06/02/2021)

⁶⁰ Hyun-ju Ock, 2019, *Loc. Cit.*

Yoo-young yang merupakan mantan atlet Judo juga menuduh mantan pelatih sekolah menengahnya berulang kali memperkosanya. Lee Ji-hye mantan atlet Taekwondo juga mengatakan dalam sebuah wawancara televisi bahwa dia telah dilecehkan secara seksual oleh mantan pelatihnya selama lima tahun. Begitu pula yang dialami oleh Kim Eun-hee mantan pemain tenis mengungkapkan bahwa pelatihnya telah melakukan pelecehan seksual terhadapnya sejak usia 20 tahun.⁶¹

Gerakan *#MeToo* pada tanggal 4 Agustus 2018, lebih dari 70.000 wanita di Korea Selatan berkumpul di Gwanghwamun Square untuk melakukan demonstrasi atau protes masalah pelecehan seksual melalui kamera-kamera tersembunyi yang sengaja dipasang di ruang ganti dan toilet umum wanita selain itu mereka juga protes terhadap budaya patriarki masyarakat Korea yang masih kental. Gerakan ini dilihat sebagai produk bola salju dari gerakan *#MeToo* di Korea Selatan.⁶² Pemerintah Korea Selatan bagian Kementerian Ketenagakerjaan juga memberikan tanggapan terkait Gerakan *#MeToo* ini dengan melakukan amandemen Undang-undang tentang Pelecehan Seksual pada 29 Mei 2018 amandemen telah dibuat untuk kesempatan kerja yang sama dan UU Bantuan Kesetaraan Pekerja dan Keluarga atau *Equal Employment Opportunity and Work Family Balance Assistance Act* (EEO Act) termasuk hukuman yang lebih berat untuk majikan atau

⁶¹ BBC, 2019, *Sex Abuse Scandal Hits South Korea's Elite Skating Scene*, diakses dari <https://www.bbc.com/news/world-asia-46942374> (05/02/2021)

⁶² Hakyung Kate Lee, 2018, *Thousands of women protest against spy cameras, gender-biased investigations*, ABC News, diakses dari <https://abcnews.go.com/International/thousands-women-protest-spy-cameras-gender-biased-investigations/story?id=57011255> (15/11/2018)

atasan yang gagal menyelidiki atau tidak konsisten dalam menyelidiki tuduhan pelecehan seksual.⁶³

Undang-undang EEO yang diubah dan penambahan fitur meliputi: (1) Pelatihan Pelecehan Seksual: Pengusaha harus memastikan para karyawan mematuhi amandemen UU EEO dengan menyediakan pelatihan pencegahan pelecehan seksual preventif di tempat kerja setidaknya sekali dalam setahun. Pelatihan ini diperlukan agar semua karyawan sepenuhnya diberitahu tentang kewajiban hukum mereka; (2) Perlindungan untuk korban dan saksi pelecehan dimana UU EEO melarang tindakan merugikan terhadap korban maupun pelapor. Tindakan merugikan meliputi pemecatan atau penurunan jabatan, tindakan disiplin, melakukan skorsing terhadap korban maupun saksi, mendiskriminasi korban dalam penilaian kinerja atau dengan mengecualikan korban dari intensif kenaikan atau hak istimewa lainnya seperti peluang untuk pendidikan atau pelatihan, dan *bullying* atau pengasingan terhadap korban. UU EEO juga memberikan perlindungan bagi karyawan yang menyaksikan atau sadar akan pelecehan seksual di tempat kerja; (3) Kewajiban untuk menyelidiki yaitu dalam menanggapi setiap laporan pelecehan seksual setiap atasan harus langsung melakukan penyelidikan tanpa adanya tindakan penundaan selain itu juga harus memastikan bahwa korban tidak mengalami penghinaan lebih lanjut; (4) Kewajiban kerahasiaan baru yang ketat juga dikenakan pada setiap orang yang menginvestigasi keluhan, menerima laporan atau berpartisipasi dalam penyelidikan; dan (5) kewajiban lebih lanjut tentang

⁶³ Fatim Jumabhoy dan Lauren Lee, 2018, *South Korea: Tough New Sexual Harassment Amendments Enacted*, SHRM, diakses dari <https://www.shrm.org/resourcesandtools/legal-and-compliance/employment-law/pages/global-south-korea-metoo.aspx> (25/02/2021)

atasan: ketika pelecehan seksual di tempat kerja di konfirmasi atas permintaan korban atasan harus mengambil tindakan yang tepat dengan menawarkan kepadanya perubahan tempat kerja atau cuti berbayar. Atasan juga harus mengambil tindakan pendisiplinan yang sesuai terhadap pelaku.⁶⁴

Perubahan ini disertai denda administratif baru dan hukuman, termasuk hukuman penjara hingga 3 tahun. Perusahaan perlu memperbarui kebijakan pelecehan seksual dan aturan kerja mereka untuk mendukung UU EEO ini. Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in juga mengumumkan langkah-langkah untuk penguatan hukuman atas kekerasan seksual. Untuk penyerangan seksual hukuman maksimal akan dinaikkan menjadi 10 tahun dari 5 tahun.

2.3.2. Gerakan #MeToo Sebagai Fenomena *Global Civil Society*

Masalah kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan masalah global karena perempuan di setiap negara di dunia ini banyak yang mengalami permasalahan ini sehingga sebuah gerakan untuk melawan masalah kekerasan seksual dengan sangat mudah dan cepat untuk menyebar di negara-negara di dunia. Seperti halnya, Gerakan #MeToo yang kemudian menyebar di banyak negara di dunia namun bentuknya berbeda-beda dari mulai dengan melakukan pengunggahan kembali dan membalas tautan di twitter mengenai kampanye gerakan #MeToo dan ada juga yang memulai gerakan ini ke negaranya dengan melakukan hal yang sama dengan Alyssa Milano yaitu menyuarakan gerakan ini dan mendapat dukungan sehingga gerakan juga dilakukan secara nyata dengan cara kampanye, mengadakan

⁶⁴ *Ibid.*

konferensi pers, pertemuan dan juga mempengaruhi pemerintah secara langsung untuk kemudian memberikan respon kepada gerakan ini.

Gerakan *#MeToo* sendiri sudah ada pada tahun 2006 yang dilakukan oleh seorang aktivis bernama Tarana Burke. Tarana Burke merupakan seorang korban pelecehan seksual yang sadar bahwa keadilan tidak akan diperoleh oleh perempuan yang bernasib sama dengannya kalau perempuan tersebut tidak berani membuka suara untuk melaporkan tindakan pelecehan seksual yang pernah dialami. Awal mulanya muncul gerakan ini ketika Burke mendirikan organisasi *Just Be Inc* di Alabama, Amerika Serikat untuk membantu perempuan kulit gelap. Namun, gerakan yang dilakukan Burke hanya sebatas membantu perempuan yang bernasib sama dengannya tetapi tidak memiliki tujuan kampanye sosial seperti yang kemudian muncul pada tahun 2017 ini lewat *platform* media sosial. Setelah gerakan ini menyebar luas Tarana Burke muncul dan mengatakan bahwa tujuan dari Gerakan *#MeToo* adalah untuk menginspirasi setiap perempuan untuk mengatakan yang sebenarnya dan terbebas dari rasa malu dan dapat menempatkan rasa malu tersebut kepada tempat yang seharusnya yaitu pada para pelaku kekerasan seksual.⁶⁵

Barulah pada tahun 2017, Gerakan dengan tagar '*#MeToo*' ini kembali muncul melalui jejaring sosial Twitter dan diikuti dengan aksi tuduhan terhadap tindakan kekerasan seksual oleh perempuan di berbagai negara. *#MeToo* juga telah

⁶⁵ Stephanie Zacharek, Eliana Dockterman, dan Haley Sweetland Edwards, 2017, *Person of the Year is 'The Silence Breakers'*, Time, diakses dari <https://time.com/time-person-of-the-year-2017-silence-breakers/> (15/01/2021)

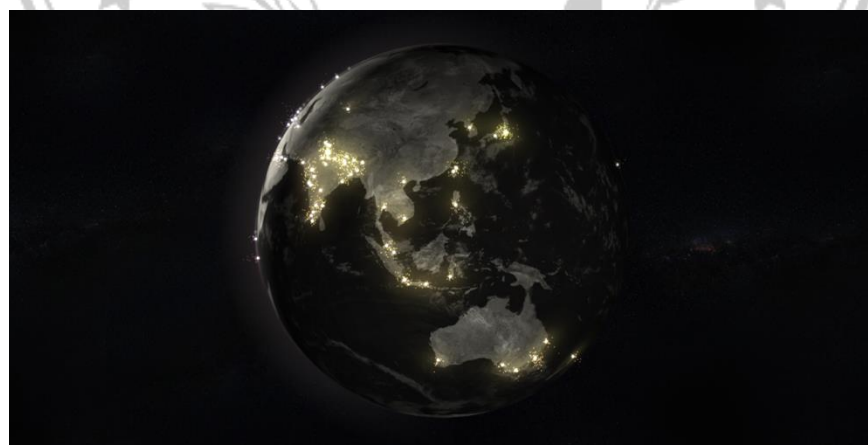
beredar di 85 negara.⁶⁶ Sangat tidak mengherankan bahwa gerakan ini mampu menjangkau begitu banyak negara, karena gerakan ini memiliki profil permasalahan yang sangat konvensional yang dialami oleh sebagian perempuan di dunia dan juga potensial dialami oleh setiap perempuan pula. Namun pendekatan gerakan ini adalah bagaimana memecahkan budaya diam oleh perempuan.

Gambar 2.5 Visualisasi penyebaran Gerakan #MeToo melalui Google Trends

(a) Benua Amerika



(b) Benua Asia dan Australia

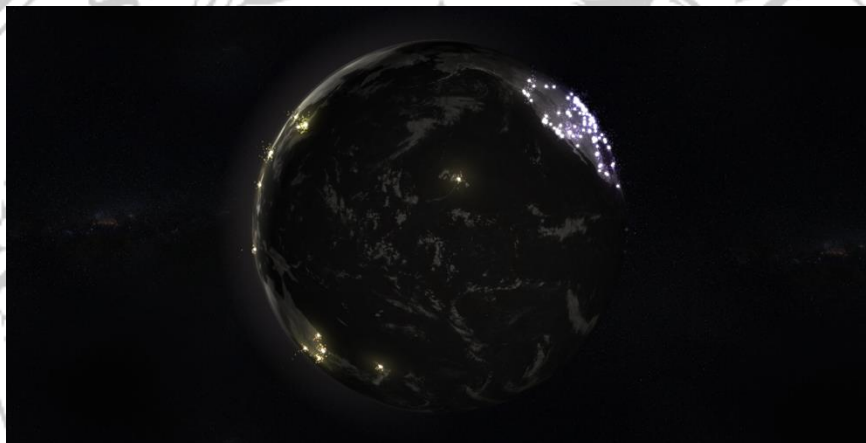


⁶⁶ Rosalind Gill dan Shani Orgad, 2018, *The Shifting Terrain of Sex and Power: from the 'Sexualization of Culture' to #MeToo*, Journal SAGE Vol. 21 No.8, diakses dari http://eprints.lse.ac.uk/91503/1/Gill_The-shifting-terrain.pdf (08/04/2021) Hal. 1316

(c) Benua Eropa, Eurasia dan Benua Afrika



(d) Honolulu, Hawaii



(Sumber: metoorising.withgoogle.com)

Gerakan *#MeToo* dimulai di Amerika Serikat pada 5 Oktober 2017 oleh seorang artis *Hollywood* Allysia Milano melaporkan pelecehan seksual yang dilakukan oleh produser film Harvey Weinstein pada dirinya juga kemudian membawa serentetan artis lainnya yang juga menyuarakan hal yang sama beberapa artis tersebut diantaranya adalah Angelina Jolie, Ashley Judd, Rossanna Arquette, Mira Paltrow, Asia Argento, Gwyneth Paltrow, Rose McGowan, Mira Sorvino, Lauren Sivan, Ramola Garai, dan beberapa artis lainnya. Pada 15 Oktober 2017

Alyssa Milano mengunggah tautan di Twitter yang berbunyi "*If you've been sexually harassed or assaulted write 'me too' as a reply to this tweet*". Tweet tersebut memperoleh lebih dari 60.000 komen.⁶⁷

Gambar 2.6 Gambar sematan dalam Tweet Alyssa Milano

Me too.

Suggested by a friend: "If all the women who have been sexually harassed or assaulted wrote 'Me too.' as a status, we might give people a sense of the magnitude of the problem."

(Sumber: Twitter.com/Alyssa_Milano)

"Efek Weinstein" memicu tuduhan terhadap puluhan orang terkemuka, mulai dari aktor *Hollywood* hingga pembawa acara TV dan Politisi. Kemudian gerakan ini menyebar dengan cepat yang ditandai dengan jutaan wanita di seluruh dunia berbagi cerita mereka tentang pelecehan seksual bahkan perkosaan yang mereka alami di Spanyol menjadi *#YoTambien*, di Perancis menjadi *#BalanceTonPorc*, di Italia menjadi *#Guellavoltache*, bahkan di Tiongkok walaupun negara ini, penggunaan berbagai akun media sosial seperti Facebook,

⁶⁷ @Alyssa_Milano, 2017, *If you've been sexually harassed or assaulted write "me too" as a reply to this tweet*, Twitter Post, diakses dari https://twitter.com/Alyssa_Milano/status/919659438700670976 (09/04/2021)

Instagram, dan Twitter di blokir tetapi mereka tetap menyuarakan Gerakan *#MeToo* melalui jejaring media sosial lokal.⁶⁸

Di Washington, pada 22 Oktober 2017 empat senator perempuan Amerika Serikat berbicara tentang pengalaman mereka tentang pelecehan seksual dalam sebuah wawancara oleh NBC, *"Meet the Press"*⁶⁹; 24 Oktober 2017, Mantan Presiden George H.W. Bush dituduh menyentuh aktris Heather Lind dan meminta maaf atas kelakuannya⁷⁰; 15 November 2017, UU *Me Too Congress* diperkenalkan untuk menargetkan pelecehan seksual dan penyerangan di Capitol Hill⁷¹; 28 November 2017, 223 perempuan yang bekerja di badan keamanan nasional menyebut diri mereka sebagai *#MeTooNatSec*, menulis surat terbuka berisi permohonan kepada Direktorat Intelijen Nasional untuk menjamin bahwa perempuan dapat melakukan pekerjaan mereka dengan bebas dari rasa takut dan memiliki keyakinan terciptanya kesetaraan gender⁷²; 11 Desember 2017, 3 wanita mengaku bahwa mereka dilecehkan secara seksual oleh Donald Trump sebelum ia mencalonkan diri sebagai presiden.⁷³

⁶⁸ Elizabeth Burden, dkk, 2018, *The #MeToo shockwave: how the movement has reverberated around the world*, The Telegraph, diakses dari <https://www.telegraph.co.uk/news/world/metoo-shockwave/> (17/11/2018)

⁶⁹ Sarah D. Wire, 2017, *Four female senators tell their #MeToo stories*, Los Angeles Times, diakses dari <https://www.latimes.com/politics/washington/la-na-pol-essential-washington-updates-four-female-senators-tell-their-metoo-1508687034-htmlstory.html> (24/11/2018)

⁷⁰ Dino Ray Ramos, 2017, *George H.W. Bush Apologizes After Actress Claims He "Sexually Assaulted" Her*, Deadline, diakses dari <https://deadline.com/2017/10/george-hw-bush-heather-lind-sexual-assault-apology-actress-turn-washingtons-spies-1202194306/> (24/11/2018)

⁷¹ Susan Davis, 2017, *"Me Too" Legislation Aims To Combat Sexual Harassment In Congress*, NPR, diakses dari <https://www.npr.org/2017/11/15/564405871/me-too-legislation-aims-to-combat-sexual-harassment-in-congress> (24/11/2018)

⁷² Maya Rhodan, *Sexual Harassment: National Security Women Sign Open Letter*, Time, diakses dari <http://time.com/5039104/we-too-are-survivors-223-women-in-national-security-sign-open-letter-on-sexual-harassment/> (24/11/2018)

⁷³ Eun-kyung Kim, 2017, *3 women who have accused President Trump of sexual misconduct speak out on Megyn Kelly*, Today, diakses dari <https://www.today.com/news/3-women-who-have-accused-president-trump-sexual-misconduct-speak-t119890> (24/11/2018)

Selain di Amerika Serikat, Gerakan ini muncul juga di 85 negara lainnya. Di Eropa, Parlemen Uni Eropa mengadakan sesi untuk membahas masalah kekerasan seksual dan pelecehan sebagai respon terhadap Gerakan *#MeToo* yang mulai meluas dan karena temuan situs web Brussels pada awal bulan, *Politico Europe* mengumpulkan lebih dari 30 tuduhan anonim tentang pelecehan, penyerangan dan pemerkosaan yang mereka alami; di Inggris pada 28 Oktober 2017, Menteri Perdagangan Internasional Mark Gernier mengakui melakukan pelecehan seksual secara verbal kepada asistennya dan beberapa menteri senior lainnya dituduh melakukan kejahatan seksual⁷⁴; 20 Desember 2017, Damian Green Menteri Luar Negeri dipecat karena menyimpan video pornografi dan telah melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap penulis Kate Maltby⁷⁵; 9 Februari 2018, amal Oxfam yang diterima lebih dari 300 Euro setahun dari pemerintah Inggris dan sumbangan publik juga menggunakan tenaga pelacuran untuk para pekerja peristiwa ini terjadi selama operasi kemanusiaan setelah gempa bumi 2010 di Haiti.⁷⁶

Tambahan lagi, di negara Eropa yaitu Perancis, pada 13 Oktober 2017 seorang jurnalis Sandra Muller menggunakan *#BalanceTonPoc* di Twitter yang terinspirasi oleh *#MeToo* untuk menceritakan pengalamannya dimana ia telah mengalami pelecehan seksual selanjutnya puluhan ribu wanita Perancis mengunggah kasus pelecehan seksual dengan tagar yang digunakan Sandra Muller;

⁷⁴ Elizabeth Burden, dkk, 2018, *Loc. Cit.* Hal 36

⁷⁵ Vasco Cotovio dan Ben Westcott, 2017, *UK minister Damian Green fired over porn scandal*, CNN, diakses dari <https://edition.cnn.com/2017/12/20/europe/damian-green-resignation-uk-intl/index.html> (24/11/2018)

⁷⁶ *Ibid.*

Pada 21 Oktober 2017 profesor Universitas Oxford, Tariq Ramadhan dilaporkan telah melakukan pemerkosaan dan penyerangan seksual oleh penulis Feminis Hendra Ayari pada tahun 2012 dan di akhir bulan Oktober laporan yang sama juga dilaporkan oleh seorang perempuan secara anonim. Perempuan tersebut mengklaim bahwa tindakan penyerangan seksual yang ia terima terjadi di Hotel Lyon pada tahun 2009; di Spanyol pada 25 November 2017 ribuan orang turun di jalanan Madrid untuk memprotes kekerasan terhadap wanita dengan membawa spanduk di antaranya bertuliskan “kamu tidak sendirian, aku percaya kamu.” Dengan menyematkan *#YoTambien* atau *#MeToo* dalam Bahasa Inggris. Seorang profesor di Spanyol juga mengeposkan tautan di Twitter dengan menggunakan *#MeToo* *#YoTambien* dengan tautan berisi pernyataan bahwa dia telah dilecehkan berkali-kali dan bahwa dia tidak akan diam.⁷⁷

Di Denmark pada 15 Oktober 2017 Penyanyi Pop Islandia Björk, melaporkan dia mengalami pelecehan seksual oleh sutradara film terkenal di Denmark yang banyak orang menganggap tuduhan itu mengacu pada Lars Von Trier; Di Italia pada 14 Oktober 2017 Model Samantha Panagrosso dan Zoe Brock melaporkan Zoe Fabrizio Lombardo melakukan tindakan pelecehan seksual dengan “membeli” mereka untuk Weinstein; 15 Oktober 2017 bintang film Italia, Asia Argento melaporkan Weinstein melakukan serangan seksual dia membagi kisahnya melalui artikel New Yorker menggunakan *#quellavoltache* yang juga terinspirasi oleh Gerakan *#MeToo*. Argento juga membuat laporan kepada seorang aktor Italia

⁷⁷ The local, 2018, *#MeToo in Europe: New laws on consent and catcalling*, diakses dari <https://www.thelocal.fr/20181006/metoo-in-europe-new-laws-on-consent-and-catcalling> (24/11/2018)

yang juga melakukan pelecehan seksual kepadanya; Di Swedia pada 10 November 2017 hampir 600 aktris Swedia bergabung dengan pemenang Oscar Alicia Vikander menandatangani surat terbuka yang mengutuk pelecehan seksual di industri hiburan selain itu ribuan wanita di industri musik juga melakukan hal yang sama dan diterbitkan di media surat kabar Dagens Nyheter dan pada 21 Desember 2017, Parlemen Swedia mengeluarkan RUU untuk menambah hukuman penjara bagi perlakuan kekerasan seksual dan pelecehan seksual dengan hukuman penjara maksimal 4 tahun; di Swiss pada 18 Desember 2017, anggota Parlemen Swiss Yannick Buttet mengundurkan diri setelah dilaporkan dan tertangkap karena tindakan pelecehan seksual terhadap koleganya; dan di Rusia pada 27 Februari 2018, Yekaterina Kotrikadze seorang wakil editor saluran RTVI menuduh Leonid Slutsky ketua komite urusan luar negeri parlemen Rusia melecehkannya pada tahun 2011 minggu berikutnya, wartawan BBC Farida Rustamova juga menuduh Slutsky juga melakukan pelecehan seksual terhadapnya pada Maret 2017.⁷⁸

Di timur tengah, pada 18 Oktober 2017, di Israel surat kabar Yediot Aharonot menggunakan Frasa Ibrani dengan arti "*Us Too*" yang sebagai bentuk dukungan terhadap *MeToo Movement* dan juga seorang anggota *Knesset* (Parlemen Israel), Merav Ben Aei mengatakan ia mendapat pelecehan seksual oleh tentara laki-laki di pangkalan militer dan pada 2 November 2017, laporan pelecehan seksual dilayangkan juga pada Presiden Kehset TV oleh Jurnalis yang menerima perlakuan pelecehan seksual⁷⁹; di Arab Saudi pada 6 Februari 2018, Sabica Khan

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ Oren Lieberman, 2017, *#MeToo movement plays out on air in Israel*, CNN, diakses dari <https://edition.cnn.com/2017/11/17/middleeast/metoo-israel-tv-anchor/index.html> (24/11/2018)

seorang wanita Pakistan melaporkan mendapatkan pelecehan seksual di tempat ibadah yaitu Ka'bah. Khan mengatakan bahkan di tempat ibadah pun dia merasa tidak aman.⁸⁰

Di Australia pada 27 November 2017 seorang pekerja dari rumah tangga Don Burke (tokoh berkebudaihan di televisi) melaporkan pelecehan seksual yang ia terima dan awalnya terungkap setelah jurnalis Tracey Spicer, terinspirasi oleh Gerakan *#MeToo* dan mengundang wanita yang mengalami pelecehan seksual kemudian menceritakan kisahnya salah satunya adalah pekerja Don Burke. Kemudian ia mengarahkan orang-orang ke arah konseling, dukungan hukum, dan polisi. Sebelumnya juga aktor *Neighbours* Craig McLachlan juga dituduh melakukan pelecehan seksual oleh beberapa wanita yang bekerja dengannya di acara *Rocky Horror* Australia.⁸¹

Di Afrika Selatan pada 18 Oktober 2017 mantan anggota parlemen dan penyanyi Jennifer Ferguson menyebarkan kasus pelecehan seksual oleh politisi ANC dan CEO *South African Football Association*, Danny Jordan yang melakukan pelecehan seksual terhadap dirinya pada 24 tahun yang lalu. Ferguson menyebarkan dengan mengunggah tautan di Facebook dan mengakui terinspirasi oleh *#MeToo*. Ferguson merencanakan tur Afrika Selatan dengan tema *#WeToo*, untuk mendukung korban pelecehan seksual; Pada 30 November 2017, *Miss Universe*

⁸⁰ Anjali Jha, 2018, *Muslim women share sexual harassment incidents during Hajj with #MosqueMeToo*, The Indian Express, diakses dari <https://indianexpress.com/article/trending/trending-globally/muslim-women-sharing-their-sexual-harassment-incidents-at-hajj-has-shaken-up-netizens-metoo-5058222/> (24/11/2018)

⁸¹ Lorna Knowles dan Alison Branley, 2017, "He was trying to take my top off": Don Burke accused of sexual harassment, diakses dari <https://www.abc.net.au/news/2017-11-27/don-burke-accused-of-sexual-harassment-indecent-assault/9188070> (24/11/2018)

2017 Demi Leigh Nel Peters menggunakan platformnya untuk melakukan kampanye dengan judul *Unbreakable* di mana ia bekerjasama dengan para ahli pertahanan diri untuk melatih wanita dalam menangani pelecehan seksual dan penyerangan.⁸²

Di Asia pada 30 November 2017, tepatnya di Hongkong, “*Queen of Hurdless*” Vera Lui Lai Yiu mengunggah gambar dirinya memegang selembur kertas dengan kata-kata “*#MeToo*” di halaman akun *Facebook* nya. Lui mengalami pelecehan seksual oleh mantan pelatihnya yang tidak disebutkan namanya pada 10 tahun lalu. Dia mengatakan dia maju untuk meningkatkan kesadaran publik tentang kekerasan seksual dan mendorong korban untuk berani berbicara; Di Tiongkok pada November 2017, Sophia Huang Xueqin pendiri komunitas *Anti Sexual Harassment* (ATSH) dia merangkul gerakan *#MeToo* sebagai bagian dari proyek ATSH dengan melakukan *survey* terhadap jurnalis wanita tentang pengalaman pelecehan seksual yang mereka alami; 27 November 2017 Xu Yalu mengunggah artikel di *WeChat* yang merinci tentang laporan mengenai pelecehan seksual yang ia terima bahwa ia telah mengunggah laporan pelecehan seksual pada 2013 namun telah dihapus oleh *Chinese Censors* dan bahkan polisi mengatakan bahwa tidak ada yang bisa mereka lakukan tentang pelecehan; 13 Januari 2018 seorang profesor Universitas dipecat dan yang lain diselidiki karena tuduhan pelanggaran seksual dimana tuduhan pertama muncul setelah seorang mahasiswa mengunggah di *Sina*

⁸² Katleho Sekhotho, 2018, *Jennifer Ferguson: #MeToo campaign has been a powerful tool*, diakses dari <https://ewn.co.za/2018/10/17/jennifer-ferguson-metoo-campaign-has-been-a-powerful-tool> (24/11/2018)

Wibo bahwa seorang profesor telah memaksanya melakukan hubungan seksual dan unggahannya itu disertai dengan #WoYeShi atau diartikan #MeToo.⁸³

Masih di kawasan Asia, Gerakan #MeToo di Jepang dimulai ketika Shiori Ito, seorang wartawan mengungkapkan kepada media tindakan kekerasan seksual yang diterimanya oleh Noriyuki Yamaguchi seorang wartawan terkemuka yang memiliki hubungan dengan Perdana Menteri Jepang;⁸⁴ di Korea Utara pada 8 Maret 2018, sebuah laporan diterbitkan bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional mereka melakukan demonstrasi tentang kekerasan seksual dan pelecehan seksual yang terjadi di semua sektor masyarakat Korea Utara; Di India pada 19 Oktober 2017, Aktris Konkona Sen Sharma dan Radhika Apte menyatakan dukungan terhadap Gerakan #MeToo; pada 24 Oktober 2017, Raya Arkar seorang mahasiswa pasca sarjana Universitas California melakukan laporan dalam bentuk dokumen yang didalamnya terdapat tuduhan kepada lebih dari 50 akademisi di berbagai universitas di India dan AS telah melakukan pelecehan seksual dan mendapat dukungan dari perempuan-perempuan di India; 14 Desember 2017 Maneka Gandhi selaku Menteri Wanita dan Perkembangan Anak di India, menulis kepada 24 produser film *Bollywood* untuk menuntut mereka mematuhi undang-undang pelecehan seksual India dan menjamin lingkungan kerja yang aman bagi semua karyawan.⁸⁵

⁸³ Maria Repnikova dan Weile Zhou, 2018, *#MeToo movement in China: Powerful yet fragile*, Aljazeera, diakses dari <https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/metoo-movement-china-powerful-fragile-181022082126244.html> (24/11/2018)

⁸⁴ Brooke Larsen, *Will the Me Too Movement in Japan Make a Difference?*, Culture Trip, diakses dari <https://theculturetrip.com/asia/japan/articles/will-the-me-too-movement-in-japan-make-a-difference/> (14/6/2018)

⁸⁵ Manveena Suri, 2018, *India's #MeToo moment? Media and entertainment industry shaken by allegations*, CNN, diakses dari <https://edition.cnn.com/2018/10/10/asia/india-metoo-intl/index.html> (24/11/2018)

Momentum Gerakan #MeToo tidak hanya digunakan untuk perlawanan terhadap kasus kekerasan seksual akan tetapi digunakan lebih jauh yaitu menjadi seruan untuk isu-isu feminis yang lebih luas seperti ketidaksetaraan gender yang mengakar di setiap wilayah dan juga lebih jauh lagi mengenai hak reproduksi dan protes mengenai pandangan misoginis ataupun seksisme.

Dalam konteks ini, perempuan di Filipina memberikan protes lewat media sosial maupun secara langsung menggunakan #BabaeAko (*I'am Woman*) mengenai komentar “seksisme” Presiden Rodrigo Duterte yang salah satunya adalah dia menyatakan bahwa dia akan melakukan pendekatan romantis kepada kepala pariwisata negara dan dia juga menyamakan memiliki istri kedua sama halnya dengan menjaga “Ban serep” di bagasi mobil. Dan di Thailand, para perempuan juga melakukan protes menentang pandangan masyarakat umum terhadap cara berpakaian mereka. Dimana perempuan yang mengenakan baju yang lebih terbuka mereka dipandang sebagai pelacur sehingga banyak perempuan yang memanfaatkan momentum #MeToo untuk mengkritik hal tersebut dengan #Don'tTellMeHowToDress.⁸⁶ Perempuan di Jepang juga membuat protes terhadap budaya *dress code* yang memaksa atau mencoba menyamaratakan bahwa yang merupakan perempuan harus mengenakan sepatu tinggi atau *high heels* dengan menyuarakan #KuToo. Di pihak lain, perempuan di negara Timur Tengah protes melawan pandangan bahwa mengungkapkan pengalaman kekerasan seksual

⁸⁶ Aria Hanguy Chen dan Suyin Haynes, 2018, *#MeToo heads east*, Time, diakses dari <https://time.com/5428182/metoo-heads-east/> (14/02/2021)

terlepas dari tujuannya merupakan hal yang sangat tabu menggunakan *#MosqueMeToo*.⁸⁷

Tersebarnya Gerakan *#MeToo* ini menunjukkan bahwa Globalisasi, Konektivitas, dan gerakan hak-hak perempuan dapat memiliki pengaruh yang sangat besar. Jutaan individu dapat menyadari bahwa peraturan telah berubah dan mereka mampu melakukan sesuatu yang berpengaruh secara global. Gerakan *#MeToo* telah mengekspos kasus pelecehan seksual di seluruh penjuru dunia. Gerakan *#MeToo* adalah bagian daripada gerakan transnasional dan merupakan bagian *Global Civil Society* dimana isu yang dibahas adalah merupakan isu global yang mana semua negara juga mengalami isu yang sama dan mereka mengandalkan komunikasi lintas batas berupa media sosial dan media masa seperti program TV internasional dan bekerja pada premis solidaritas *supraterritorial* yang merupakan motivasi yang muncul karena rasa solidaritas sosial dan kepedulian sesama dan dapat dilihat pada beberapa kasus yang menggunakan *#UsToo* bahkan *#WithYou* bukan *#MeToo* lagi menandakan bahwa mereka memiliki rasa kepedulian yang tinggi terhadap kasus-kasus yang dilaporkan sebagai bentuk gerakan *#MeToo*. Selain itu, mereka yang menjadi bagian dari gerakan *#MeToo* ini tak jarang memiliki tujuan untuk menghadirkan kesadaran sesama perempuan terhadap kekerasan seksual dan mendukung mereka yang mengalami kekerasan seksual untuk sama-sama tidak berdiam diri.

⁸⁷ Mona Eltahawy, 2020, *#MosqueMeToo Was About Solidarity Among Muslim Women*, The Washington Post, diakses dari <https://www.washingtonpost.com/opinions/2020/05/08/metoo-around-the-world/?arc404=true> (03/03/2021)

Begitu pula dengan tersebarluasnya *#MeToo* melalui mediasi media sosial atau internet juga menandai bahwa *#MeToo* memiliki kekuatan mobilisasi sebagai *Global Civil Society*. Konsep dasar *#MeToo* adalah kekuatan angka sampai kapan pun. Karena jika hanya dilakukan oleh satu orang saja tanpa adanya mobilisasi atau kampanye untuk mengajak semua perempuan mengungkapkan hal yang sama, maka akun tunggal tersebut mungkin tidak dapat dipercaya. Adanya mobilisasi gerakan ini atau perluasan ikatan sosial ini juga yang membuat setiap individu dapat dipercaya atau memiliki kekuatan untuk mengungkapkan tindakan kekerasan seksual. Gerakan ini juga merupakan klaim pembuktian bahwa permasalahan ini memang benar adanya dan perempuan menginginkan perubahan. Hal tersebut dibuktikan dengan penggunaan *#MeToo* itu sendiri bahwa: “Hal yang anda katakan terjadi pada anda, terjadi pada saya juga”.⁸⁸ Hal ini juga sejalan dengan dua dimensi yang dimiliki oleh GCS dimana yang pertama adalah, perluasan ikatan sosial hingga ke seluruh tingkat dunia dan dapat melalui beberapa sektor salah satunya adalah internet dimana internet adalah yang menjadi media perluasan gerakan ini dan yang kedua adalah berusaha memberikan konten normatif dan kekuatan memobilisasi tentunya adalah dengan ingin menghentikan budaya diam juga tindakan kekerasan seksual dan memobilisasinya dengan cara mengajak perempuan untuk menggunakan tagar tersebut sembari mengungkapkan permasalahan kekerasan seksual yang mereka terima.

⁸⁸ Laurie Collier Hillstrom, 2019, *The #MeToo Movement*, diakses dari https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=mR2DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=%23metoo+movement+book&ots=Jd5hpczwIY&sig=pHVMHES3X8ZKwaFja8YkkFRGFf0&redir_esc=y#v=onepage&q=%23metoo%20movement%20book&f=false (08/04/2021) Hal. 1

Selain itu, walaupun *#MeToo* merupakan sebuah gerakan namun gerakan ini juga merupakan bagian dari *Global Civil Society* (GCS) dengan memenuhi kriteria lain sebagai GCS menurut Scholte dimana GCS merupakan aktivitas sukarela dengan tujuan membentuk kebijakan, norma, ataupun struktur sosial yang lebih dalam. Gerakan ini muncul dengan sukarela adalah untuk membela hak perempuan untuk berbicara tanpa rasa malu dan mendapatkan keadilan. Beberapa pengamat seperti Laura Kipnis jurnalis Guardian menempatkan Gerakan *#MeToo* dalam konteks yang lebih luas dan melihatnya sebagai tonggak bersejarah lainnya dalam pertarungan untuk hak-hak perempuan. Gerakan ini juga dianggap sebagai langkah dalam perjuangan politik selama berabad-abad bagi perempuan untuk sekedar mengontrol tubuh mereka sendiri.⁸⁹ Gerakan ini juga membawa perhatian publik yang sangat dibutuhkan pada meluasnya permasalahan kekerasan seksual di dunia dan menjembatani penjelasan tentang fenomena kekerasan seksual yang selalu dialami perempuan secara diam-diam untuk mempertahankan pekerjaan mereka, atau enggan mengubah hidup mereka atau bersikap abai hanya untuk menghindari konflik-konflik yang akan mempengaruhi status sosial mereka. Selain itu Gerakan yang hanya terdiri dari dua kata ini mampu memperdayakan perempuan di seluruh dunia untuk bergabung bersama dan berbicara menentang seksisme, kebencian terhadap perempuan, dan diskriminasi. Menurut Rebecca Solnit, *"The losses due to misogyny and racism have been normalized forever. The*

⁸⁹ *Ibid.* Hal. 3

task has been to de-normalize them and break the silence they impose. To make a society in which everyone's story gets told".⁹⁰

Tambahan lagi, bahwa GCS menurut Scholte merupakan masyarakat yang berada di luar pemerintah tetapi dibentuk oleh masyarakat antar negara. Hal ini juga sangat tercermin dalam profil Gerakan *#MeToo* dimana gerakan ini dibentuk dan dikampanyekan untuk perempuan di seluruh negara di dunia dan tidak terbatas pada satu negara tertentu. Gerakan ini juga tidak dibentuk oleh pemerintah dan tentunya tidak memiliki keberpihakan terhadap pemerintah atau merupakan kelompok non pemerintah. Gerakan ini justru menuntut atau melakukan *Lobbying* terhadap pemerintah untuk mengusahakan terlaksananya tindakan-tindakan tertentu dan perubahan unsur normatif sehingga mampu membuat perempuan mencapai haknya dimana pun mereka berada.

⁹⁰ *Ibid.* Hal. 6.